

2024

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TAPANAG BAARAT TAHUN 2024



Kecamatan Tapalang Barat
KABUPATEN MAMUJU
SULAWESI BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2023

Keberadaan rencana kerja ini merupakan suatu langkah awal bagi kecamatan Tapalang Barat dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Tapalang Barat yaitu "**Profesional Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Tapalang Barat yang Bermartabat**" sebagai salahsatu Kecamatan Penopang Pembangunan dan Penyangga Perekonomian Kabuapeten Mamuju dengan Berbasis Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kerakyatan

Diharapkan rencana kerja ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam setiap pengambilan langkah maupun kebijakan Kecamatan Tapalang Barat. Dengan demikian akan terciptakan keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program – program kerja guna tercapainya visi dan misi Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

Di masa mendatang, sangat diharapkan pula masukan dan sasaran perbaikan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan rencana kinerja periode selanjutnya.

Akhir kata, Rancanagan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tapalang Barat Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik kami harapkan untuk penyempurnaan ke depannya

Dungkait, Maret 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN I | 1

 1.1 LATAR BELAKANG I | 1

 1.2 LANDASAN HUKUM I | 2

 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... I | 5

 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN I | 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... II | 1

 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....II | 1

 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD.....II | 30

 2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH..... II | 39

 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... II | 40

 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKATII | 46

BAB III TUJUAN DAN SARAN PERANGKAT DAERAH..... III | 1

 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU..... III | 1

 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA 2023..... III | 4

 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAPALANG BARAT TAHUN 2024..... III | 7

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... IV | 1

 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAPALANG BARAT TAHUN 2024..... IV | 1

BAB V PENUTUP VI | 1

LAMPIRAN : - SK Tim Penyusun Renja Kecamatan Tapalang Barat TA 2024;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Renja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju merupakan dokumen perencanaan kerja Kecamatan Tapalang Barat selama 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini merupakan penjabaran dari beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Tapalang Barat pada Tahun Anggaran 2024 Dalam proses penyusunannya didasarkan atas sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju dengan usulan rencana *Bottom Up* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Mamuju Selain itu juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati Reses DPRD dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026.

Renja PD Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 dan tahun berjalan 2023, serta memuat program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2024

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Mamuju RKPD ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mamuju Dari uraian tersebut terlihat jelas adanya keterkaitan yang sangat erat antara Renja Perangkat Daerah, Dokumen RKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2022 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pula Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 288);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
30. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kabuapeten Mamuju selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2024 meliputi :

- 1.2.1 Program dan kegiatan Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2024
- 1.2.2 Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2024
- 1.2.3 Indikator kinerja Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2024
- 1.2.4 Kelompok sasaran Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2024
- 1.2.5 Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun Anggaran 2024

Secara umum tujuan penyusunan Renja Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan Perangkat Daerah dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapeten Mamuju Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2024 adalah :

Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Tapalang Barat Tahun 2024

1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tapalang Barat Tahun sebelumnya.
2. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tapalang Barat Tahun sebelumnya.
3. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Tapalang Barat Tahun 2024
4. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum Penyusunan

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Pera
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****BAB V PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Kecamatan Tapalang Barat berdasarkan Renstra Kecamatan Tapalang Barat Tahun 2021 – 2026 yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Perangkat Daerah (dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju merupakan salah satu Perangkat Daerah di pemerintah Kabuapeten Mamuju yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2002, Tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan Dalam Wilayah Kabuapeten Mamuju dan Peraturan Bupati Mamuju No. 59 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mamuju

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)

Pada tahun 2023 Kecamatan Tapalang Barat melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabuapeten Mamuju sebesar Rp 2.016.231.071,- (*Dua Miliar Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah*), kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) Tahun 2023 menjadi Rp 1.789.964.885 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 1.703.895.795,- atau persentase realisasi sebesar 95%

Adapun Target dan realisasi anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN TAPALANG BARAT
TAHUN 2023

No	KEBIJAKAN/SASARAN	URAIAN PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN		TARGET SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
			KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	
1	4	5					3	4	5
KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT				2.016.231.071		1.789.964.885		1.703.895.795	86.069.090
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	1.948.575.721	100%	1.737.207.935	100%	1.651.138.845	86.069.090
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.084.200	100%	16.084.200	100%	15.690.550	393.650
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	4.240.150	2 Dok	4.240.150	2 Dok	4.240.150	-
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	5.375.800	2 Dok	5.375.800	2 Dok	5.374.150	1.650
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	2.429.350	1 Dok	2.429.350	1 Dok	2.037.350	392.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.352.850	1 Dok	1.352.850	1 Dok	1.352.850	-
5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	2.686.050	3 Dok	2.686.050	3 Dok	2.686.050	-
6		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.545.835.971	100%	1.439.569.785	100%	1.410.664.995	28.904.790
7		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.536.231.071	14 Bulan	1.429.964.885	14 Bulan	1.401.658.175	28.306.710

8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	1 Dok	2.952.450	1 Dok	2.952.450	1 Dok	2.364.450	588.000
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dok	6.652.450	1 Dok	6.652.450	1 Dok	6.642.370	10.080
9		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.156.850	100%	4.156.850	100%	3.132.450	1.024.400
II		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.156.850	1 Laporan	4.156.850	1 Laporan	3.132.450	1.024.400
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		14.300.000		14.300.000		14.300.000	-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenkapannya		14.300.000		14.300.000		14.300.000	-
1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	93.415.600	100%	89.277.600	100%	57.917.800	31.359.800
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.800.000		1.800.000		1.800.000	-
1		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31 Jenis	4.138.000	31 Jenis	-	31 Jenis	-	-
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13 Jenis	16.281.600	13 Jenis	16.281.600	13 Jenis	16.229.800	51.800
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	1.848.000	4 Jenis	1.848.000	4 Jenis	1.848.000	-
4		Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Kali	12.900.000	20 Kali	12.900.000	20 Kali	12.900.000	-
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Kali	56.448.000	270 Kali	56.448.000	270 Kali	25.140.000	31.308.000

1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	59.743.200	100%	6.720.000	100%	-	6.720.000
1		Pengadaan Kendaraan Dinas	2 Unit	21.733.200	2 Unit	-	2 Unit	-	-
2		Pengadaan Mebel	4 Jenis	38.010.000	4 Jenis	6.720.000	4 Jenis	-	6.720.000
V		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	145.217.000	100%	125.217.000	100%	121.109.050	4.107.950
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	32.255.500	3 Jenis	12.255.500	3 Jenis	11.179.500	1.076.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Orang	112.961.500	5 Orang	112.961.500	5 Orang	109.929.550	3.031.950
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	69.822.900	100%	41.882.500	100%	28.324.000	13.558.500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	41.882.500	10 Unit	41.882.500	10 Unit	28.324.000	13.558.500
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	27.940.400	10 Unit	-	10 Unit	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	31.313.750	100%	27.856.950	100%	27.856.950	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	23.583.450	100%	23.583.450	100%	23.583.450	-

		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	23.583.450	1 Kegiatan	23.583.450	1 Kegiatan	23.583.450	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	7.730.300	100%	4.273.500	100%	4.273.500	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15 Laporan	7.730.300	15 Laporan	4.273.500	15 Laporan	4.273.500	-
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	3.522.000	100%	-	100%	-	-
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	3.522.000	100%	-	100%	-	-
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Kegiatan	3.522.000	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	24.900.000	100%	24.900.000	100%	24.900.000	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	24.900.000	100%	24.900.000	100%	24.900.000	-

		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Kegiatan	24.900.000	-	24.900.000	-	24.900.000	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	7.919.600	100%	-	100%	-	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7.919.600	100%	-	100%	-	-
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan pendayagunaan aset Desa	7 Desa	2.906.000	7 Desa	-	7 Desa	-	-
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Kali	5.013.600	7 Kali	-	7 Kali	-	-
JUMLAH				2.016.231.071		1.789.964.885		1.703.895.795	86.069.090

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2023)

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yakni terdiri dari 5 program.

Berdasarkan evaluasi Laporan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan IV 31 Desember Tahun 2024 realisasi anggaran Kecamatan Tapalang Barat sudah mencapai **Rp 1.703.895.795,-** atau sebesar **95%**.

Adapun rincian anggaran dan target realisasi kinerja sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Masukan input berupa dana Rp 16.084.200,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah
Masukan input berupa dana Rp 1.439.569.785 - dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Masukan input berupa dana Rp 4.156.850 - dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah
Ddaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Daerah Masukan input berupa dana Rp 14.300.000 - dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Masukan input berupa dana Rp 89.277.600 dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah Masukan input berupa dana Rp 6.720.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Barang Milik Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Masukan input berupa dana Rp 125.217.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Masukan input berupa dana Rp 41.882.500,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Masukan input berupa dana Rp 23.583.450,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait selama 1 tahun (7 Desa) dengan target realisasi sebesar 100%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Masukan input berupa dana Rp 4.273.500,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%

C. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Masukan input berupa dana Rp. 0,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%. (dana dihilangkan setelah Adanya Pengurangan Anggaran)

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Masukan input berupa dana Rp 24.900.000 - dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah selama 1 Tahun dengan target realisasi sebesar 100%

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Masukan input berupa dana Rp. 0,- Indikator Keluaran Kegiatan adalah terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Daerah selama 1 Tahun dengan target realisasi sebesar 100% (Dana dihilangkan setelah adanya pengurangan)

Realisasi Pelaksanaan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra 2021- 2026. Realisasi pencapaian program dan kegiatan Renstra Kecamatan

Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%. dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%. dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023 capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%. dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Masukan input berupa dana Rp 109.566.000- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%. dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023 capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023 capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2024, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terpeliharanya Barang Milim Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait selama 1 tahun (7 Desa) dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Indikator Keluaran Kegiatan adalah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

C. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah selama 1 Tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keluaran Kegiatan adalah terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Daerah selama 1 Tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100

Tabel 22

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai dengan Tahun 2023
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tapalang Barat

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Targte Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Adm Perkantoran								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran SKPD sesuai standar dan tepat waktu								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja RENJA	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	100	20.00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	100	20.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	100	20.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	100	20.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	4 Laporan	100	5.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	110 Orang	66 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	0 Orang	100	0.91
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	100	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	4 Laporan	100	5.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100	5.00

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66 Pasang	- Pasang	0 Pasang	0 Pasang	- persen	22 Pasang	100	1.52
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Belanja	20 Jenis	- Jenis	0 Jenis	- Jenis	- Persen	0 Jenis	100	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155 Jenis	62 Jenis	0 Jenis	- Jenis	persen	Jenis	100	100.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	12 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	persen	Jenis	100	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105 Jenis	63 Jenis	21 Jenis	21 Jenis	100 persen	21 Jenis	100	100.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Jenis	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 persen	2 Jenis	100	100.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Jenis	12 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100 persen	2 Jenis	100	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Kali	360 Kali	120 Kali	120 Kali	100 Persen	12 Kali	100	100.00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100 Persen	0 Unit	100	100.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	9 Unit	- Unit	0 Unit	- Unit	- Persen	0 Unit	100	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	7 Unit	7 Unit	- Unit	100 persen	0 Unit	100	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15 Jenis	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 Persen	2 Jenis	100	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	20 Jenis	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 persen	0 Jenis	100	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50 Unit	30 Unit	10 Unit	10 Unit	100 persen	0 Unit	100	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	5 Gedung	- Gedung	0 Gedung	- Gedung	- persen	0 Gedung	100	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat							-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Persen	1 Kegiatan	100	100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25 Jenis	15 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	3 Jenis	100	100.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat							-	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Persen	0 Kegiatan	100	100.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Persen	0 Kegiatan	100	100.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat							-	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35 Desa	21 Desa	7 Desa	1 Desa	100 Pesern	0 Desa	100	100.00
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	37 Kegiatan	21 Kegiatan	7 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Persen	0 Kegiatan	100	100.00

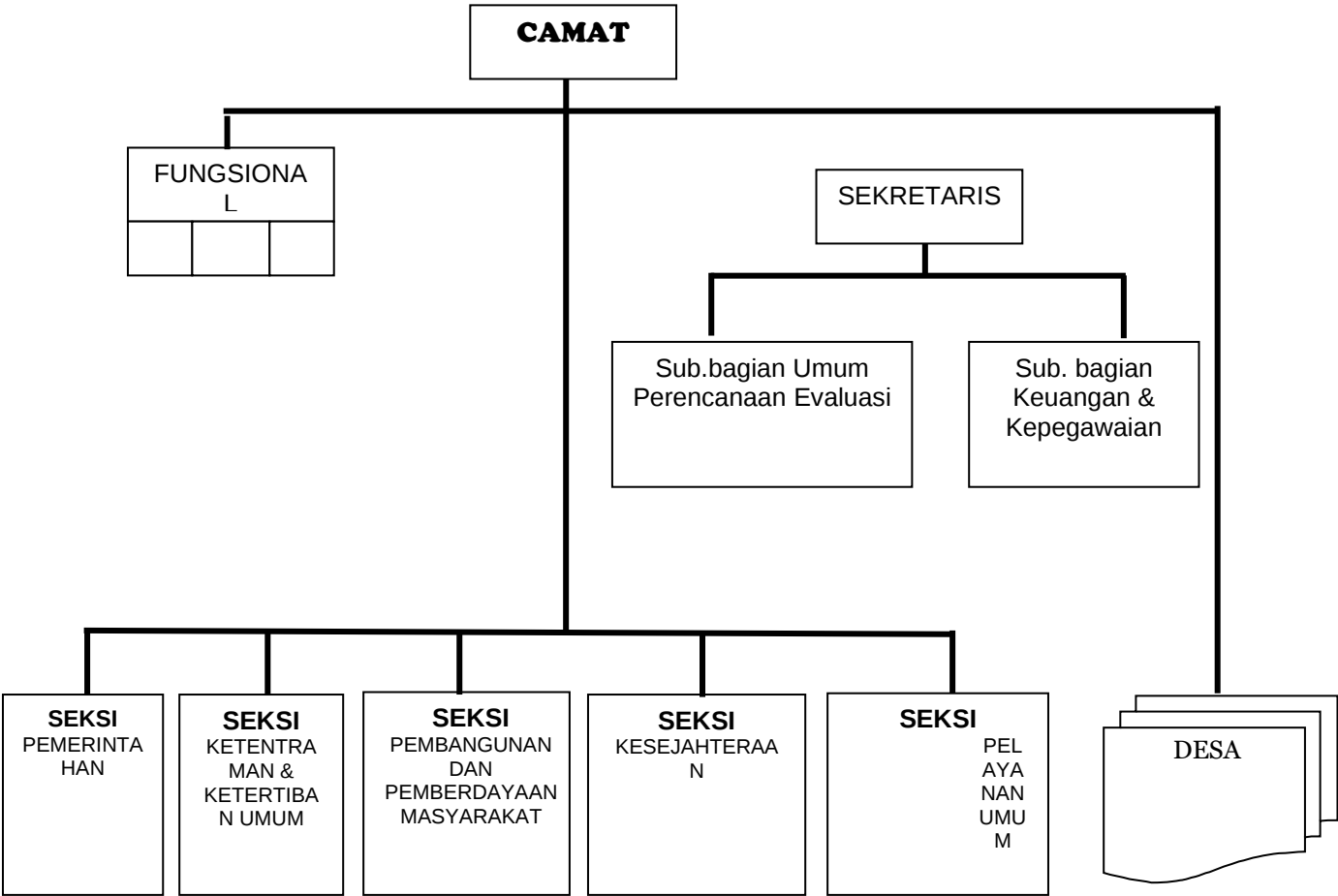
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju No. 59 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mamuju bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan Desa serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT



Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum Evaluasi dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pelayanan Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Susunan Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mamuju, maka Kecamatan Tapalang Barat mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan

1. **Camat**

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penergakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang–undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset serta pengkoordinasian tugas – tugas pada setiap seksi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja kecamatan;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan kecamatan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan di lingkup kecamatan;
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas pada masing – masing
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian, Yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum Evaluasi dan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan Program dan rencana kerja pengelolaan administrasi lingkup program dan keuangan;
 2. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program kecamatan;
 3. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi keuangan kecamatan;
 4. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program dan keuangan kerja kecamatan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan Program dan rencana kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah kecamatan, penataan kearsipan kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan kecamatan, dan pengelolaan perlengkapan;
 3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan,

penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

3. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program dan rencana Seksi Pemerintahan;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pemerintahan;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program dan rencana Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

5. Seksi Pelayanan Umum

- a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pelayanan umum; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada

Seksi Pelayanan Umum.

6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

- a. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,
- b. membagi tugas dan mengontrol urusan Kesejahteraan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
- c. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada

Tabel T-C30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tapalang Barat
Kabupaten Mamuju

NO	INDIKATOR (tujuan/sasaran strategis)	SPM / STANDAR NASIONAL (permendagri 59/2020)	IKK (sesuaikan dengan permendagri 18 dan 86)	SATUAN	TARGET KINERJA				REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kec. Tapalang Barat			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase pemenuhan pelayanan sesuai standar			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penurunan pelanggaran trantibum			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
5	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Salah satu sasaran strategis Kecamatan Tapalang Barat adalah meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efisien. Indikator kerja dari sasaran strategis ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Tapalang Barat Tahun 2023			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 %	82,02 %

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai target. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dari pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004, dengan menggunakan kuisioner yang diberikan ke 100 responden. Indikator yang menjadi penilaian terhadap pelayanan publik terkait IKM diantaranya :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Tata cara / prosedur pelayanan yang diberikan
3. Ketepatan pelaksanaan layanan dengan waktu penyelesaian layanan
4. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan
5. Hasil pelayanan yang diberikan / produk layanan yang diterima
6. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan
7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan
8. Janji / maklumat pelayanan yang diinformasikan
9. Fungsi pengaduan atau komplain layanan berjalan dengan baik
10. Sarana pengaduan Komplain yang disediakan di unit layanan
11. Ketersediaan fasilitas / sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
12. Tata tertib pelayanan
13. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan
14. Keamanan pelayanan di unit pelayanan

Di Tahun 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan 82 % dan teralisasi juga 82.02%. Hasil ini diperoleh melalui survei dengan metode pengisian kuisioner sebanyak 100 lembar secara acak kepada masyarakat yang berkunjung ke *counter* pelayanan kecamatan.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tingkat Desa dan kecamatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, efektif dan efisien.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tapalang Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi juga terbatas, sementara salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Sarana dan prasarana aparatur harus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana prasarana teknologi informasi.
- 3) Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi baik di kecamatan maupun Desa seperti pelimpahan kewenangan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah kelurahan
- 4) Beberapa kelengkapan pelayanan masih bergantung ketersediaan dari pemerintah pusat, seperti blanko KTP elektronik, dimana pengadaan dan distribusinya oleh Kementerian Dalam Negeri
- 5) Masih kurangnya koordinasi internal maupun eksternal (instansi lain)
- 6) Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang dan harus ditingkatkan sehingga pembangunan akan semakin berkembang.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Tapalang Barat harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus

ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja (*performance*) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk tahun 2024 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara program pilihan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan program dan kegiatan pilihan yang direncanakan. Perbedaan terjadi pada kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur membutuhkan anggaran lebih untuk kebutuhan peralatan / mesin kantor, pemeliharaan gedung dan penataan halaman kantor kecamatan pasca pelebaran jalan di depan kantor Kecamatan Tapalang Barat. Namun dikarenakan pagu indikatif RKPD awal sudah ditentukan maka nilai kegiatannya disesuaikan menurut skala prioritas. (Tabel 2.3)

Tabel 23
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN MAMUJU

DAERAH: KECAMATAN TAPALANG BARAT

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISA HASIL KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	9	5	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2,330,428,988	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,912,453,121	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	22,989,800.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	13,340,200.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	4,500,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	4,240,150.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	100%	8,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	100%	4,591,800.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	100%	3,700,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	100%	1,645,350.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	3,700,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	1,352,850.00	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3,089,800.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,510,050.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100%	1,867,111,188.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100%	1,543,875,971.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,860,036,188.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,536,231,071.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	3,575,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1,776,450.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	3,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	5,868,450.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah	100%	4,500,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah	100%	1,285,350.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersusunnya Dokumen Laoparan Penatausahaan BMD	100%	4,500,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Tersusunnya Dokumen Laoparan Penatausahaan BMD	100%	1,285,350.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	44,500,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	22,090,000.00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tapalang Barat	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	15,000,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tapalang Barat	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	9,090,000.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tapalang Barat	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	15,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tapalang Barat	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	13,000,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	132,500,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	94,649,400.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	20,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1,800,000.00	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	3,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	4,138,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	25,750,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	15,068,400.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	6,750,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	1,980,000.00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Tapalang Barat	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	100%	23,000,000.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Tapalang Barat	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	100%	15,215,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Penyelenggaraan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	54,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tapalang Barat	Penyelenggaraan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	56,448,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	78,500,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	83,065,200.00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	24,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	21,733,200.00	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Mebel	100%	15,000,000.00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Mebel	100%	22,500,000.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	12,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	22,600,000.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	15,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	12,500,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	16,232,000.00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	122,828,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97,334,500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	25,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	14,352,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	97,828,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	82,982,500.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	57,500,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	56,812,500.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	43,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	43,082,500.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tapalang Barat	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	8,500,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tapalang Barat	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	5,900,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tapalang Barat	Terelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	6,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tapalang Barat	Terelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	7,830,000.00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100%	24,000,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100%	29,087,750.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	24,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	23,583,450	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	24,000,000.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	23,583,450.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang telah ditindaklanjuti	100%	5,750,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang telah ditindaklanjuti	100%	5,504,300	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100%	5,750,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Tapalang Barat	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100%	5,504,300.00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Tingkat Keamanan dan Tertertiban Umum	100%	5,586,000.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Tingkat Keamanan dan Tertertiban Umum	100%	11,162,000.00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditindak lanjuti	100%	5,586,000.00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditindak lanjuti	100%	11,162,000.00	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase subkegiatan oordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	5,586,000.00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase subkegiatan oordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	11,162,000.00	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	25,750,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	20,660,000.00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	25,750,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	20,660,000.00	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Tapalang Barat	Jumlah Laporan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	25,750,000.00	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Tapalang Barat	Jumlah Laporan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	20,660,000.00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Desa yang menindaklanjuti Pembinaan dan Pengawasan	100%	14,426,000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Desa yang menindaklanjuti Pembinaan dan Pengawasan	100%	12,868,200.00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	14,426,000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tapalang Barat	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	12,868,200.00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Tapalang Barat	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	4,500,000.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Tapalang Barat	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	4,948,600.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan pendayagunaan aset Desa	Kecamatan Tapalang Barat	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	3,082,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan pendayagunaan aset Desa	Kecamatan Tapalang Barat	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	2,906,000.00	

	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tapalang Barat	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	6,844,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tapalang Barat	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	5,013,600.00	
JUMLAH					2,400,190,988.00					1,986,231,071.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up yaitu usulan* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabuapten Mamuju Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mamuju yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui musrenbang Desa yang diajukan ke Kecamatan Tapalang Barat Kabuapten Mamuju Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan dimusrenbangkan oleh Kecamatan Tapalang Barat berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Tapalang Barat adalah usulan untuk Program Percepatan Infrastruktur Desa (PIK). Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 adalah

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARAPEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN TAPALANG BARAT

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan SPBM	Desa Dungkit	Tersedianya BBM Nelayan di Wilayah Kecamatan Tapalang Barat	1 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Kabupaten Mamuju

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia Yang Yang maju Mandiri, Adil dan Makmur**"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

- 4) RPJMN ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini, kita sedang memasuki RPJM ke-4 (2015-2020), yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKANGOTONG-ROYONG”**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (Tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Visi dan misi pembangunan pemerintah dalam RPJM Nasional harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPJM Daerah.

Dalam Kajian Awal RPJMD 2021-2024, Visi Kabupaten Mamuju 2021-2026 adalah **“Mamuju Keren” KREATIF, EDUKATIF, RAMAH, ENERGIK, NYAMAN**

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah:

8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
9. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Potensi Lokal
10. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
11. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
12. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	1. Pengembangan SDM Aparatur 2. Penerapan e government 3. Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Potensi Lokal	Meningkatkan kinerja ekonomi melalui pengembangan sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata, Industri Kreatif dan UMKM serta perluasan kesempatan kerja	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Menurunnya tingkat pengangguran	Menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi
Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.	Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	1. Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan 2. Meningkatnya kualitas layanan bidang pendidikan	Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah
	Peningkatan Layanan Bidang Kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	1. Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan 2. Meningkatnya kualitas layanan bidang kesehatan	
	Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatnya akses pelayanan bidang sosial	
		2. Meninokatnya kualitas layanan bidang sosial	
Mewujudkan daerah yang beradab dengan mendapatkan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.	Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara.	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara.	Pengarusutamaan Agama, Budaya dan Kearifan Lokal berbasis modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi.	Meningkatkan Infrastruktur Fisik dan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Fisik dan Ekonomi yang Berkualitas	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar dan perekonomian

Visi Kecamatan Tapalang Barat

“Profesional dalam Pelayanan, Menuju Masyarakat Tapalang Barat yang bermartabat”.

Visi merupakan cara pandang kedepan, kearah mana Kecamatan Tapalang Barat akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai kondisi yang diinginkan oleh Kecamatan Tapalang Barat secara terus menerus dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengadakan perubahan kearah kebaikan. Perubahan tersebut harus disusun dengan tahapan terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang senantiasa berorientasi pada pencapaian hasil.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Tapalang Barat meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kecamatan Tapalang Barat baik sebagai organisasi perangkat daerah maupun seluruh masyarakat yang berada berada dalam suatu kawasan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2002, Tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju dengan batas-batas yang telah ditentukan.
- b. Penopang Pembangunan : Kecamatan Tapalang Barat merupakan wadah atau sarana pembangunan yang ada di luaran se kecamatan Tapalang Barat baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti tertuang dalam UUD 1945 alinea ke IV.
- c. Penyangga Perekonomian: Kecamatan Tapalang Barat merupakan daerah penyangga berperan sangat penting bagi kelestraian suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai *buffer* dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap kawasan pada daerah atau desa sekitar kawasan yang berinteraksi tinggi dengan memadukan kepentingan konservasi dan perekonomian masyarakat sekitarnya. Pengembangan dan pengelolaannya didasarkan pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar.
- d. Berbasis Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kerakyatan: Dalam hal ini Kecamatan Tapalang Barat melaksanakan sesuai dengan UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dengan upaya melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan msyarakat setempat dan menjamin keterpaduan sektor antar daerah, antar sektor dan daerah dan tetap melestarikan kebudayaan yang telah ada sehingga keanekaragaman menjadi pemersatu. Selain itu, juga berbasis ekonomi kerakyatan dengan kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat secara swadaya yang dapat diusahakan selanjutnya disebut Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju memiliki misi yaitu

MISI”

- 1. Mewujudkan pelayanan publik yang professional
- 2. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 3. Menyelenggarakan Pemerintahan yang melayani
- 4. Melaksanakan Koordinasi

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tapalang Barat
Kabupaten Mamuju

Guna mencapai visi dan misi tersebut diatas maka Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju menetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, sebagaimana table 3.1 berikut:

VISI: Profesional dalam Pelayanan, Menuju Masyarakat Tapalang Barat yang bermartabat.”					
No	Misi	Tujuan Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan pelayanan public yang professional	Meningkatkan Mamujurokrasi Pemerintahan yang baik	- Meningkatnya kapasitas dan propesionalise ASN; - Meningkatnya tatakelolah pemerintahan;	- Peningkatan Pelayanan Publik - Pelaksanaan standar Operasional Prosudur (SOP)	- Meningkatkan Cakupan Layanan untuk Pelayanan Prima - Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas kinerja
2	Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan Terselenggarany a system perencanaan dari bawah (Buttom UP)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan - Menampung dan menyaring aspirasi masyarakat	- Melaksanakan Musrenbang DES dan Musrenbang Kecamatan - Melibatkan Masyarakat dam perencanaan pembangunan
3	Menyelenggar akan Pemerintahan	Meningkatkan kemampuan dan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Pembinaan melalui pelatihan dan diklat	a. Memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti

	yang melayani	keterampilan aparatur			diklat (bagi yang memiliki kinerja yang baik) b. Melakukan penilaian terhadap kinerja aparatur c. Mempromosikan untuk menduduki jabatan
4	Melaksanakan Koordinasi	wujudnya sinergitas antara penyelenggara pemerintahan	koneksinya Perencanaan dengan Program Kegiatan OPD	- Melaksanakan pertemuan lintas sektor - Melakukan kunjungan kerja	- Menyusun jadwal kegiatan - Melakukan pertemuan secara berkala

3.3 Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak.

lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa

Untuk menunjang tujuan dan sasaran tersebut diatas, Kantor Camat Tapalang Barat mengusulkan 4 program dan kegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021. Program dan kegiatan tersebut adalah :

A. Program Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- 2.5.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.5.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2.5.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 2.5.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 2.5.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 2.5.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2.5.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.5.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

C. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Hubungan Sasaran, Indikator Kinerja dengan Program dan Kegiatan Kecamatan
Tapalang Kabuapaten Mamuju**

Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Kegiatan	
	1	2	3	4		5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			100%		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

			100%		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			100%		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2			100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
					2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			100%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3			100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	KoordinasiPenerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mamuju

Perangkat Daerah : Kecamatan Tapalang Barat

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X	XX												
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Adm Perkantoran		100%	1,912,453,121.00	DAU/PAD		100%	2,088,595,433.10
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran SKPD sesuai standar dan tepat waktu	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	13,340,200.00	DAU/PAD	Pencapaian RPJMD	100%	14,674,220.00
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja RENJA	Kantor Camat Tapalang Barat	2 Dokumen	4,240,150.00	DAU/PAD	Pencapaian RPJMD	2 Dokumen	4,664,165.00
X	XX	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	Kantor Camat Tapalang Barat	1 Dokumen	4,591,800.00	DAU/PAD	Pencapaian RPJMD	1 Dokumen	5,050,980.00
X	XX	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Camat Tapalang Barat	1 Dokumen	1,645,350.00	DAU/PAD	Pencapaian RPJMD	1 Dokumen	1,809,885.00
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kantor Camat Tapalang Barat	1 Dokumen	1,352,850.00	DAU/PAD	Pencapaian RPJMD	1 Dokumen	1,488,135.00

X	XX	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban	Kantor Camat Tapalang Barat	3 Dokumen	1,510,050.00	DAU/PAD	Pencapaian RPJMD	3 Dokumen	1,661,055.00
X	XX	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	1,543,875,971.00	DAU/PAD	Pencapaian RPJMD	100%	1,698,263,568.10
X	XX	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Cakupan layanan administrasi	Kantor Camat Tapalang Barat	14 Bulan	1,536,231,071.00	DAU	Pencapaian RPJMD	14 Bulan	1,689,854,178.10
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Tapalang Barat	1 Dokumen	1,776,450.00	DAU	Pencapaian RPJMD	1 Dokumen	1,954,095.00
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Tapalang Barat	4 Dok	5,868,450.00	DAU	Pencapaian RPJMD	4 Dok	6,455,295.00
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	1,285,350.00	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	1,413,885.00
X	XX	01	2	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Kantor Camat Tapalang Barat	1 Dokumen	1,285,350.00	DAU	Pencapaian RPJMD	1 Dokumen	1,413,885.00
X	XX	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	22,090,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	24,299,000.00
X	XX	01	2.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kantor Camat Tapalang Barat	30 Orang	9,090,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	30 Orang	9,999,000.00
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kantor Camat Tapalang Barat	3 Orang	13,000,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	3 Orang	14,300,000.00
X	XX	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	94,649,400.00	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	104,114,340.00
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Belanja	Kantor Camat Tapalang Barat	5 Jenis	1,800,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	5 Jenis	1,980,000.00

X	XX	01	2.1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Tapalang Barat	4 Jenis	4,138,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	4 Jenis	4,551,800.00
X	XX	01	2.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat Tapalang Barat	14 Jenis	15,068,400.00	DAU	Pencapaian RPJMD	14 Jenis	16,575,240.00
X	XX	01	2.1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Tapalang Barat	2500 lbr	1,980,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	2500 lbr	2,178,000.00
X	XX	01	2.1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Camat Tapalang Barat	4 Jenis	15,215,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	4 Jenis	16,736,500.00
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Tapalang Barat	150 Kali	56,448,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	88 Kali	62,092,800.00
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	83,065,200.00	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	91,371,720.00
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Tapalang Barat	1 Unit	21,733,200.00	DAU	Pencapaian RPJMD	2 Unit	23,906,520.00
X	XX	01	2.1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Kantor Camat Tapalang Barat	4 Unit	22,500,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	4 Unit	24,750,000.00
X	XX	01	2.1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Tapalang Barat	2 Unit	22,600,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	4 Unit	24,860,000.00
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Tapalang Barat	4 Jenis	16,232,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	4 Jenis	17,855,200.00
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	97,334,500.00	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	107,067,950.00

X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Tapalang Barat	3 Jenis	14,352,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	3 Jenis	15,787,200.00
X	XX	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Tapalang Barat	9 Orang	82,982,500.00	DAU	Pencapaian RPJMD	9 Orang	91,280,750.00
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	56,812,500.00	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	47,390,750.00
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat Tapalang Barat	13 Unit	43,082,500.00	DAU	Pencapaian RPJMD	12 Unit	47,390,750.00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kantor Camat Tapalang Barat	10 Unit	5,900,000.00		Pencapaian RPJMD	10 Unit	6,490,000.00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Kantor Camat Tapalang Barat	1 Gedung	7,830,000.00		Pencapaian RPJMD	1 Gedung	8,613,000.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	<u>29,087,750.00</u>	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	<u>31,996,525.00</u>
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	23,583,450.00	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	25,941,795.00

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Camat Tapalang Barat	1 Kaegiata	23,583,450.00	DAU	Pencapaian RPJMD	1 Kaegiata	25,941,795.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	5,504,300.00	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	6,054,730.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Camat Tapalang Barat	5 Jenis	5,504,300.00	DAU	Pencapaian RPJMD	5 Jenis	6,054,730.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	<u>11,162,000.00</u>	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	<u>12,278,200.00</u>
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	11,162,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	12,278,200.00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan	Kantor Camat Tapalang Barat	1 Kegiatan	11,162,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	1 Kegiatan	12,278,200.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	<u>20,660,000.00</u>	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	<u>22,726,000.00</u>

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	20,660,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	22,726,000.00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Tapalang Barat	1 Kegiatan	20,660,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	1 Kegiatan	22,726,000.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	<u>12,868,200.00</u>	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	<u>8,711,560.00</u>
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Tapalang Barat	100%	12,868,200.00	DAU	Pencapaian RPJMD	100%	8,711,560.00
7	01	6	2	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan	Kantor Camat Tapalang Barat	7 Kali	4,948,600.00	DAU	Pencapaian RPJMD	7 Kali	5,443,460.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Kantor Camat Tapalang Barat	7 Kali	2,906,000.00	DAU	Pencapaian RPJMD	7 Kali	3,196,600.00

7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Tapalang Barat	14 Kali	5,013,600.00	DAU	Pencapaian RPJMD	14 Kali	5,514,960.00
TOTAL									1,986,231,071.00				2,164,307,718.10

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tapalang Barat Tahun 2024

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan *“Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*.

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju menyusun Rencana kerja tahun 2024 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju tahun 2021 – 2026

Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2024 sebesar **Rp 1.868.502.544,-** yang terdiri dari *belanja Program dan Kegiatan*, adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tapalang Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Masukan input berupa dana Rp 13.128.400,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah Masukan input berupa dana Rp 1.431.516.644,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Masukan input berupa dana Rp 1.210.350,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Masukan input berupa dana Rp 23.770.600,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Masukan input berupa dana Rp 105.031.400,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Mulik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Masukan input berupa dana Rp 64.525.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Masukan input berupa dana Rp 101.633.500,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Masukan input berupa dana Rp. 60.339.280,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terpeliharanya Barang Milim Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

G. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Masukan input berupa dana Rp 19.551.450,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait selama 1 tahun (7 Desa) dengan target realisasi sebesar 100%.
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Masukan input berupa dana Rp 4.615.100,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%

H. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Masukan input berupa dana Rp. 6.732.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

I. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Masukan input berupa dana Rp 10.600.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah selama 1 Tahun dengan target realisasi sebesar 100%

J. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Masukan input berupa dana Rp. 6.398.000,- Indikator Keluaran Kegiatan adalah terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Daerah selama 1 Tahun dengan target realisasi sebesar 100%

Realisasi Pelaksanaan Renstra Sampai Dengan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra 2021- 2026. Realisasi pencapaian program dan kegiatan Renstra Kecamatan

Tapalang Barat Kabupaten Mamuju sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
2. dengan target pada akhir Renstra tahun 2026 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
 3. Kegiatan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%. dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
 4. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%. dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023,, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Masukan input berupa dana Rp Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%. dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023,, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023,, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terpeliharanya Barang Milim Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023,, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

G. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait selama 1 tahun (7 Desa) dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran Kegiatan adalah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

H. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

I. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah selama 1 Tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

J. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keluaran Kegiatan adalah terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Daerah selama 1 Tahun dengan target realisasi sebesar 100% dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2023, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

Adapun rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2024 sebagaimana tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Rincian Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	2024	
							TARGET	Rp
1	2	3	4	5	7	8	13	14
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.61%	89.00%	1.868.502.544
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	100%	1.820.287.394
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja PD	100%	100%	13.128.400
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	100%	6.789.250
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD	100%	100%	1.472.400
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan DPA - SKPD	100%	100%	1.711.350
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	100%	100%	1.352.850
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100%	100%	1.802.550
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100%	100%	1.431.516.644

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	100%	100%	1.418.502.544
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	Jumlah Laporan Keuangan	100%	100%	1.399.950
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	100%	100%	11.614.150
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ADM Barang Milik Daerah	100%	100%	1.210.350
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	100%	100%	1.210.350
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	23.770.600
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	100%	100%	6.875.000
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan	100%	100%	16.895.600
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	105.031.400
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	4.241.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	100%	100%	3.706.400
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan cetak Penggandaan	100%	100%	1.848.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu	100%	100%	15.700.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	100%	100%	79.536.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	71.340.000

				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	100%	100%	33.400.000
				Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Baranag	100%	100%	31.700.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Lainnya	Jumlah Sarana	100%	100%	6.240.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	110.826.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	26.586.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.240.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	63.464.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	46.882.500
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	4.800.000
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	100%	100%	11.781.500
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	24.485.150
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	19.551.450

				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	19.551.450
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	4.933.700
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	100%	4.933.700
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	6.732.000
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	100%	100%	6.732.000
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	100%	6.732.000
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	10.600.000
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	10.600.000
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	10.600.000
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100%	100%	6.398.000

				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	6.398.000
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	100%	3.038.000
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	100%	3.360.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada pada tahun tahun sebelumnya, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju dimana implikasinya Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisasi RENJA yang ada, Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembagunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju tahun 2024 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

Dungkait, Maret 2024



KECAMATAN TAPALANG BARAT
MAHARUDDIN YAHYA, SE
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19660609 198603 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN TAPALANG BARAT

Alamat : Jln. Poros Orobatu Lebani Km. 13 Kode Pos 91352

KEPUTUSAN CAMAT TAPALANG BARAT
Nomor :Tahun 2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TAPALANG BARAT
KABUAPETEN MAMUJU TAHUN 2024

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju tahun 2021-2024, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tapalang Barat ;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Camat Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

7. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, terdiri dari pejabat dilingkungan Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Dungkait**

Pada Tanggal : **Maret 2023**



LAMPIRAN : Keputusan Camat Tapalang Barat
NOMOR :Tahun 2024
TANGGAL : Maret 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN Tapalang Barat Kabuapeten Mamuju TAHUN 2024

NO	JABATAN			JABATAN DALAM TIM
1	CAMAT TAPALANG BARAT			PENGARAH
2	SEKRETARIS KECAMATAN			PENANGGUNG JAWAB
3	KASUBBAG. UMUM PERENCANAAN DAN EVALUASI			SEKRETARIS
I.	PENGOLAHAN DATA BIDANG UMUM & KEPEGAWAIAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MISBAHUDDIN, SE		Kepala Sub. Keuangan dan Kepegawaian	Koordinator
2	MEJI. A, S.Pd		Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
3			Pengadministrasi Umum	Anggota
4			Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota
II	PENGOLAHAN DATA BIDANG PEMERINTAHAN			
			Kasi Pemerintahan	Koordinator
				Anggota
				Anggota
III	PENGOLAHAN DATA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN			
1	SYAMSUL, S.IP		Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinator
2			Analisa Pengawasan Masyarakat	Anggota

3			Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Anggota
IV	PENGOLAHAN DATA BIDANG PELAYANAN UMUM			
1	JASRIN, SE		Kasi Pelayanan Umum	Koordinator
				
			Analisa Pelayanan	
V	PENGOLAHAN DATA BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	SYARIFUDDIN, S.IP		Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Koordinator
2			Pengelola Data	Anggota
3				Anggota
VI	PENGOLAHAN DATA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	HASMAN		Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator
			Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagan	Anggota
				Anggota

2			Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
3			Pengadministrasi Umum	Anggota
4			Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota
II.	PENGOLAHAN DATA BIDANG PEMERINTAHAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1			Kasi Pemerintahan	Koordinator
III.	PENGOLAHAN DATA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1			Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinator
2			Analisa Pengawasan Masyarakat	Anggota
3			Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Anggota
IV.	PENGOLAHAN DATA BIDANG PELAYANAN UMUM			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM

1			Kasi Pelayanan Umum	Koordinator
2			Analisa Pelayanan	Anggota
V.	PENGOLAHAN DATA BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1			Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Koordinator
2			Pengelola Data	Anggota
VI.	PENGOLAHAN DATA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1			Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator
2			Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Anggota


 KECAMATAN TAPALANG BARAT
 KABUPATEN MAMUJU
 MAHARUDDIN YAHYA, SE
 Pangkat : Pembina Tingkat I
 NIP. 19660609 198603 1 008